

PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH (STUDI PADA DISPORA PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Bainil Yulina¹, Evada Dewata², Anggeraini Oktarida³, Pridson Mandiangan⁴, Ayu Chotibah⁵

¹Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: byulina@gmail.com

² Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: evada_polsri@yahoo.co.id

³ Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: bundaabangalbar@gmail.com

⁴Program Studi Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: primaputramando@gmail.com

⁵ Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: ayuchotibah24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi terhadap optimalisasi barang milik daerah di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menggunakan metode sampel jenuh. Sampel penelitian ini adalah 45 pegawai yang bekerja pada bidang umum dan kepegawaian serta bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang bertugas mengelola barang milik daerah di Dispora Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis yang dipakai adalah regresi linear berganda serta menggunakan program SPSS versi ke 25. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial, inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah. Dan secara simultan, semua variabel yaitu inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah.

Kata Kunci: Inventarisasi, Legal Audit, Birokrasi, Optimalisasi

Abstract

This research purposed to analyze the impact of assets inventory, assets legal audit, and bureaucracy structure on assets optimization in The Sport and Youth Office South Sumatera Province. By using saturation sampling method. The samples were 45 employees that working at general and employing field and planning, evaluating and reporting field who responsible to manage assets in The Sport and Youth Office South Sumatera Province. The analysis technique that used is multiple linear regression using the SPSS program version 25. The conclusion of this research is the of assets inventory, assets legal audit, and bureaucracy structure partially have a positive and significant effect on the assets optimization. And simultaneously, all variable which are assets inventory, assets legal audit, and bureaucracy structure are proved to have significant and positive influence for assets optimization.

Keywords: Inventory, Legal Audit, Bureaucracy, Optimization

1. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pengelolaan BMN/D menjelaskan bahwa barang milik negara atau BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMD diatur pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D yang sebelumnya diatur dalam PP No 27 Tahun 2014. Perubahan peraturan tersebut membawa beberapa perubahan dan perbaikan dalam sistem tata kelola barang milik negara. Peraturan tersebut berperan sebagai landasan aturan untuk pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D. Praktik pengelolaan BMD sendiri tercantum pada

Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) No 19 tahun 2016 yang berisi tentang Pedoman dalam pengelolaan BMD. Aturan tersebut mengatur tentang kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pengelolaan barang. Dengan terbitnya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMD dari kegiatan pencatatan hingga kegiatan pelaporan.

Kualitas pengelolaan BMD yang baik adalah salah satu indikator dari berhasilnya pengelolaan ekonomi daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan pengelolaan barang yang efektif membuat pemerintah harus melaksanakan pengelolaan barang dengan baik. Pengelolaan BMD yang baik juga cerminan dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana memadainya sistem pengelolaan kekayaan daerah, bersifat informatif, adanya transparansi serta akuntabilitas.

Pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap kekayaan daerah dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat mengatur serta memanfaatkan asetnya seoptimal mungkin. Kemandirian pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya diwujudkan melalui otonomi daerah yang telah tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa sudah tanggung jawab pemda untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya termasuk urusan pengelolaan BMD yaitu mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah agar memiliki daya guna karena pemerintah daerahlah yang mengetahui potensi yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan dengan optimal di daerah kekuasaannya.

Peraturan mengenai pengelolaan BMD di Provinsi Sumsel sendiri diatur dan dijelaskan dalam Perda Sumsel No 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan tersebut dibuat bertujuan agar pemerintah menjadi tertib dalam proses administrasi pengelolaan BMD milik Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus menjadi tata cara kegiatan pengelolaan barang milik pemerintah provinsi agar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terbitnya aturan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang baik sekaligus sebagai pedoman teknis perangkat daerah untuk menjalankan tata kelola barang milik daerah.

Setiap pokok dalam peraturan tersebut dijelaskan dengan rinci dengan tujuan memudahkan semua pejabat pengelola barang termasuk pejabat pada perangkat daerah selaku pengguna barang dalam melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin. Namun, dalam teknis pelaksanaannya seringkali masih terdapat masalah ataupun kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah terkait tidak tertibnya pengelolaan inventaris barang. Hal ini mengakibatkan Pemda kesulitan dalam menelaah informasi aset sehingga aset-aset yang dikelola menjadi kurang optimal.

Oleh karenanya, pengelolaan atau manajemen barang atau aset daerah dalam tiap tahapannya harus benar-benar dilaksanakan dengan maksimal karena Barang Milik Daerah adalah salah satu alat penyelenggara roda pemerintahan. Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan menunjukkan bahwa Opini BPK terhadap Laporan keuangan Provinsi Sumsel belum optimal. Pada 2010-2013 Pemprov Sumatera Selatan menerima opini WDP.

Dilansir dari laman bkkp.go.id, Pemprov Sumsel belum mendapatkan opini WTP membuktikan bahwa sistem pelaporan keuangan pemda masih belum dapat sepenuhnya diyakini tingkat kewajarannya oleh BPK. Hal ini dikarenakan adanya faktor seperti lemahnya sistem pengendalian internal dan BMN yang belum tertata secara tertib. Fakta bahwa BMN/D yang belum tertata secara tertib menjadi salah satu penyebab belum diperolehnya opini WTP dapat diartikan bahwa masih terdapat masalah dalam pengelolaan BMD Provinsi Sumsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK nomor 08.A/HP/XVIII.PLG/01/2020 atas Manajemen Aset TA 2018 dan semester 1 TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat kinerja yang belum memadai mengenai sistem pengamanan terhadap aset tetap jenis gedung dan bangunan milik pemerintah provinsi Sumsel. Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa aset gedung dan bangunan terdapat pada KIB C tidak diketahui alamat dan keterangan penggunaan. Pada KIB C tersebut, terdapat sebanyak 1.419 item gedung dan bangunan yang teregister namun tidak memiliki informasi alamat yang menunjukkan lokasi gedung dan bangunan berada serta keterangan penggunaan atas aset tersebut.

Permasalahan diatas dapat mengindikasikan bahwa masih terdapat pengelolaan aset yang belum optimal pada lingkup pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu perlu ada perbaikan agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah bisa berjalan dengan semestinya. Pemerintah Provinsi Sumsel yang dipimpin oleh Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya disertai oleh perangkat daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Sumsel No 14 Tahun 2016, perangkat daerah terdiri dari Sekretariat daerah provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Dinas Provinsi dan Badan Provinsi. Kendala mengenai pengelolaan aset juga ditemui pada salah satu perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dispora Provinsi Sumatera Selatan selaku salah satu perangkat daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kendala yang dialami adalah masih kurang

optimalnya proses pencatatan aset karena keterbatasan tenaga kerja yang ada di Dispora Provinsi Sumsel. Keterbatasan tenaga kerja berbanding terbalik dengan jumlah aset yang banyak sehingga tidak optimalnya proses pencatatan aset. Hal ini akan berdampak pada menurunnya efektivitas dan optimalitas dari aset yang dimiliki. Untuk membenahi masalah tersebut, hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki langkah-langkah dalam manajemen aset. Berdasarkan Siregar (2020:518) Manajemen dalam pengelolaan aset dibagi menjadi 5 tahapan yaitu yang pertama inventarisasi, kedua legal audit, ketiga penilaian, keempat optimalisasi dan kelima pengembangan SIMA. Untuk menyelenggarakan 5 tahapan tersebut ditunjang dengan struktur birokrasi pemerintah yang memadai.

Inventarisasi aset yang baik akan berdampak pada pengelolaan aset yang optimal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusmin (2018) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara inventarisasi aset terhadap tingkat optimalitas aset tetap di Kabupaten Sorong.

Langkah manajemen aset berikutnya adalah legal audit. Legal audit penting dilakukan untuk membuat status aset menjadi jelas dan legal, pencatatan kepemilikan aset yang jelas akan berdampak pada pengelolaan yang optimal.

Langkah selanjutnya adalah penerapan struktur birokrasi yang ada pada pemerintah. Weber dalam Yusuf (2015: 145) mengungkapkan bahwa birokrasi dilihat sebagai kehidupan kerja yang rutin. Dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan hal berulang yang terjadi pada pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Struktur birokrasi berperan untuk mengatur fungsi pokok serta tanggung jawab pegawai dalam pengelola BMD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Indira (2020), didapati bahwa inventarisasi mempunyai pengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan BMD di Pemkot Banda Aceh, dapat diindikasikan bahwasanya inventarisasi yang meningkat akan berdampak pada meningkatnya optimalisasi pemanfaatan BMD. Legal audit berperan penting dalam meningkatkan optimalisasi BMD. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sidabalok (2016) dijelaskan bahwa struktur birokrasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap optimalisasi

BMD. Hal tersebut berarti struktur birokrasi yang baik memberikan pengaruh terhadap peningkatan optimalisasi barang milik daerah namun tidak signifikan, penulis tertarik untuk meneliti variabel tersebut dan untuk mengetahui bagaimana jika variabel tersebut diteliti pada objek lain, apakah akan didapatkan hasil yang sama atau berbeda. Dari uraian tersebut, rumusan masalahnya adalah apakah inventarisasi aset, legal audit serta struktur birokrasi berpengaruh secara parsial terhadap optimalisasi barang milik daerah serta apakah inventarisasi aset, legal audit serta struktur birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap optimalisasi barang milik daerah.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Tahapan yang dialui dalam manajemen aset merupakan siklus pengelolaan aset. (Yusuf, 2015: 33). Agar dapat digunakan serta dimanfaatkan secara optimal, tahapan yang dilalui adalah langkah-langkah yang harus dijalankan untuk mengelola aset atau BMD. Langkah-langkah Manajemen aset menurut Siregar (2020: 518) adalah Penilaian Aset, Legal Audit Aset, Inventarisasi Aset, pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset) serta Optimalisasi Aset

Definisi Barang Milik Daerah

Merujuk dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, BMD meliputi aset yang dimiliki pemerintah baik berupa aset tetap maupun aset lancar. Aset atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan bersumber dari APBN yang bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai sarana atau prasarana kesejahteraan masyarakat.

Inventarisasi Aset

Siregar (2020: 518) berpendapat bahwa terdapat dua aspek dalam inventarisasi aset. Yang pertama yaitu inventarisasi fisik seperti bentuk aset, luas aset, lokasi aset, volume/jumlah aset, jenis, alamat, dan lain-lain dan yang kedua inventarisasi yuridis/legal yaitu status penguasaan aset dan legalitas aset”.

Dalam proses inventarisasi aset, perlu juga dilakukan kegiatan inventarisasi asal-usul aset, hal ini karena jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah tergolong banyak sehingga

membutuhkan inventarisasi yang baik dan teratur serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Legal Audit

Masalah legalitas yang kerap dijumpai pada BMD adalah lemahnya status atas hak penguasaan aset, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak terpantau, dan lain sebagainya. Menurut Siregar (2020: 519), legal audit berupa inventarisasi status penguasaan aset sampai dengan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.

Struktur Birokrasi

Konsep birokrasi sebenarnya mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi untuk memperbaiki efisiensi administrasi. Namun dalam faktanya, masih sering ditemui penerapan sistem administrasi yang tidak sejalan dengan konsep birokrasi, hal ini akan mengakibatkan inefisiensi dalam struktur birokrasi pemerintahan kedepannya.

Weber dalam Yusuf (2015: 145) mengungkapkan bahwa birokrasi dapat dilihat sebagai kehidupan kerja yang rutin dan diamati.

Karakteristik utama struktur birokrasi adalah adanya spesialisasi tugas secara tegas yang memungkinkan untuk mempekerjakan ahli pada setiap posisi, organisasi yang hierarkis, sistem aturan atau operasi, *impersonality*. Serta efisiensi, yaitu administrasi organisasi yang murni berbentuk birokrasi diyakini mampu mencapai tingkat efisiensi paling tinggi dengan memecahkan masalah organisasi.

Dari karakteristik yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi adalah hal dasar yang mengatur mengenai hubungan kerja antar pegawai di suatu organisasi dan seperangkat aturan yang mengatur jalannya hubungan kerja tersebut agar berjalan secara efisien. Edward dalam Sidney (2015) menyatakan bahwa dua aspek yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Optimalisasi Barang Milik Daerah

Kegiatan mengoptimalkan aset bertujuan untuk menjadikan aset bernilai guna yang lebih dan bekerja secara optimal sehingga dapat mendukung operasional pemerintah dengan maksimal guna

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi dari BMD adalah dengan memanfaatkan BMD tersebut.

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi BMD

Inventarisasi adalah kegiatan pendataan aset baik dari aspek fisik maupun non-fisik, dan pendataan aspek legalitas aset secara hukum. Dengan dilakukannya inventarisasi aset, maka informasi yang lengkap dan akurat dari nilai potensi aset dapat diperoleh (Hidayat, 2020). Dapat disimpulkan bahwa proses inventarisasi aset yang baik akan berdampak pada informasi mengenai aset yang lengkap dan relevan sehingga dapat memaksimalkan potensi aset untuk dimanfaatkan dan memudahkan pegawai dalam melakukan pelaporan barang. Dengan begitu, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh inventarisasi aset terhadap optimalisasi BMD di Dispora Provinsi Sumsel.

Pengaruh Legal Audit terhadap Optimalisasi BMD

Legal Audit merupakan kegiatan inventarisasi terhadap status penguasaan aset atau aspek legalitas aset. Legal audit yang berjalan dengan baik tentu akan memberi dampak yang baik terhadap pengoptimalisasian aset. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sidabalok, 2016) bahwa “Salah satu indikator barang milik daerah optimal adalah terhindar dari masalah hukum dan semakin baik pelaksanaan legal audit akan meningkatkan optimalisasi barang milik daerah”. Dengan begitu, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh legal audit terhadap optimalisasi BMD di Dispora Provinsi Sumsel.

Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Optimalisasi BMD

Pengelolaan barang milik daerah pada instansi atau perangkat daerah tidak terlepas dari adanya struktur birokrasi yang mengatur fungsi dan tanggung jawab antar pegawai. Struktur birokrasi yang baik adalah yang memiliki SOP (*Standard Operational Procedures*) dan adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab. Berdasarkan Sidabalok (2016), “Semakin disiplin dan tertib

suatu birokrasi, maka akan semakin termotivasi untuk meningkatkan pengoptimalan barang milik daerah”. Dengan begitu, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh struktur birokrasi terhadap optimalisasi BMD di Dispora Provinsi Sumsel.

Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, Struktur Birokrasi terhadap Optimalisasi BMD di Dispora Provinsi Sumsel

Langkah-langkah Manajemen aset menurut Siregar (2020: 518) membentuk pola pengelolaan yang saling berhubungan dengan baik. Birokrasi yang baik mendukung adanya pengelolaan yang baik pula oleh karena itu menurut Sidabalok (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan antara inventarisasi, legal audit, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi BMD. Dengan begitu, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

H₄: Terdapat pengaruh inventarisasi aset, legal audit, struktur birokrasi terhadap optimalisasi BMD di Dispora Provinsi Sumsel.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Survey yang menjadi metode penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan data dari masa lampau ataupun masa kini. Wawancara atau kuesioner yang tidak mendalam serta hasil penelitian yang cenderung digeneralisasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

Variabel Penelitian

Variabel X dalam penelitian ada 3 yaitu Inventarisasi (X₁), Legal Audit (X₂), dan Struktur Birokrasi (X₃). Sedangkan, Variabel Y dalam penelitian ini adalah Optimalisasi Barang Milik Daerah (Y).

Populasi dan Sampel

Teknik *purposive sampling* yang diterapkan pada populasi sebanyak 160 pegawai Dispora Provinsi Sumsel dengan kriteria yaitu pegawai yang terlibat dalam pengelolaan BMD di Dispora Sumsel menghasilkan sampel dari bidang yang terlibat yaitu bidang umum dan kepegawaian, serta bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah dengan aplikasi SPSS sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Optimalisasi BMD
a = Konstanta
X₁ = Inventarisasi Aset
X₂ = Legal Audit
X₃ = Struktur Birokrasi
b₁ b₂ b₃ = Koefisien regresi
e = *Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data

Kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 47 buah yang diberikan secara langsung kepada responden dengan rentang waktu 2 minggu sejak penyebaran awal di tanggal 20 April 2021. Dari 47 kuesioner yang disebarakan, terapat 45 kuesioner yang kembali.

Deskriptif Data

Statistik deskriptif data disajikan dengan ukuran statistik. Skor pada masing-masing jawaban dari item pertanyaan setiap variabel adalah minimal 1 dan maksimal 5.

Uji Validitas

Perhitungan dengan rhitung dan juga rtabel merupakan cara yang digunakan untu menguji validitas suatu data. Penelitian ini menggunakan ^ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,050 atau 5% dan didapatkan ^ttabel adalah 0,361. Berdasarkan perhitungan, nilai ^thitung pada butir pertanyaan masing-masing variabel adalah diatas ^ttabel yaitu variabel inventarisasi aset memiliki nilai ^thitung antara 0,534 sampai dengan 0,754, variabel legal audit memiliki nilai ^thitung antara 0,638 sampai dengan 0,887, variabel struktur birokrasi memiliki nilai ^thitung antara 0,698 sampai dengan 0,794, dan variabel optimalisasi barang milik daerah memiliki nilai ^thitung antara 0,537 sampai dengan 0,779. Hal ini membuktikan bahwa semua pertanyaan adalah valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Priyatno (2014: 64) terhadap penelitian yang menggunakan metode uji reliabilitas *Cronbach Alpha*, suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha >0,60.

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha Cronbach	Batas Reliabilitas	Ket.
1	Inventarisasi Aset	0,882	0,70	Reliabel
2	Legal Audit	0,867	0,70	Reliabel
3	Struktur Birokrasi	0,895	0,70	Reliabel
4	Optimalisasi Barang Milik Daerah	0,740	0,70	Reliabel

Dari hasil uji reliabilitas tersebut, semua nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,7 yang artinya semua item dalam penelitian adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji SPSS, tidak terdapat masalah asumsi klasik pada penelitian ini yang artinya semua data residual terdistribusi normal serta tidak ada multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	11.634	2.874			4.048	.000
X1	.160	.049	.398		3.251	.002
X2	.206	.092	.266		2.253	.030
X3	.164	.065	.292		2.535	.015

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear tersebut, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$= 11,634 + 0,398 X_1 + 0,266 X_2 + 0,292 X_3 + e$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi BMD

Berdasarkan hasil uji-t, diketahui nilai t-tabel sebesar 2.021 < nilai t-hitung sebesar 3.251 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 sehingga Ha1 diterima dan Ho ditolak yang artinya variabel independen Inventarisasi Aset (X1) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Optimalisasi BMD (Y).

Semakin baik inventarisasi yang dilakukan, maka akan semakin meningkat optimalisasi barang milik daerah. Inventarisasi aset dilakukan untuk mencatat sampai dengan melaporkan hasil pendataan BMD. Hal ini berarti, jika kegiatan tersebut dilakukan dengan maksimal, maka optimalisasi barang milik daerah akan meningkat. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution, dkk (2015) bahwa inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset.

Meningkatnya optimalisasi BMD adalah dampak dari baiknya proses inventarisasi yang diharapkan akan memaksimalkan potensi aset sehingga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Pengaruh Legal Audit terhadap Optimalisasi BMD

Berdasarkan hasil uji-t, diketahui nilai t-tabel sebesar 2.021 < nilai t-hitung sebesar 2.253 dengan nilai signifikansi 0,03 < 0,05 sehingga Ha1 diterima dan Ho ditolak yang artinya variabel independen Legal Audit (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Y).

Semakin baik legal audit yang dilakukan, maka akan semakin meningkatkan optimalisasi BMD. Legal audit adalah kegiatan inventarisasi terhadap status penguasaan aset dan aspek legalitas lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa legal audit berpengaruh secara positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa jika kegiatan legal audit dilakukan secara maksimal, optimalisasi barang milik daerah juga akan meningkat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amah dan Hidayat (2020). Dari penelitian tersebut

dijelaskan bahwa legal audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset. Legal audit penting dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin status atas hak milik aset pemerintah. Legal audit yang baik berdampak pada meningkatnya optimalisasi barang milik daerah.

Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Optimalisasi BMD

Berdasarkan hasil uji-t, diketahui nilai t-tabel sebesar $2.021 < \text{nilai } t\text{-hitung sebesar } 2.535$. dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak yang artinya variabel independen Struktur Birokrasi (X3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Y). Dengan kata lain, semakin baik struktur birokrasi yang ada, maka akan semakin meningkat optimalisasi barang milik daerah.

Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sidabalok (2016) bahwa struktur birokrasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi BMD, indikasi atas hal tersebut adalah belum rampungnya penyusunan SOP dalam pengelolaan barang milik daerah. Adanya SOP dan kejelasan pembagian tugas adalah 2 indikator dari struktur birokrasi yang baik. Hasil penelitian yaitu berpengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa SOP dan kejelasan pembagian tugas dalam pengelolaan BMD di Dispora Provinsi Sumsel sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan Yusuf (2015: 145), “Struktur birokrasi adalah susunan yang ada pada sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan”. Struktur birokrasi yang baik dalam suatu organisasi atau entitas dalam mengelola aset/barang milik daerah akan berdampak pada meningkatnya optimalisasi dari aset/barang milik daerah tersebut. Berdasarkan Edward dalam Sidney (2015), kinerja struktur birokrasi dapat ditingkatkan dengan dua aspek yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, dan Struktur Birokrasi terhadap Optimalisasi BMD

Berdasarkan hasil uji-F, diketahui nilai F-tabel adalah $3.22 < \text{nilai } F\text{-hitung sebesar } 3.711$ sehingga didapatkan bahwa secara simultan,

seluruh variabel x secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel y.

Besar pengaruh antar variabel independen dengan dependen diukur dengan uji *R square*, pada tabel hasil uji R^2 didapatkan Nilai *R square* (R^2) adalah 0,571. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 57,1% variabel optimalisasi barang milik daerah dapat diprediksi oleh variabel inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi, sementara sisanya sebesar 42,9% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain seperti penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian yang tidak dijelaskan pada model regresi di penelitian ini.

Langkah-langkah Manajemen aset menurut Siregar (2020: 518) adalah Penilaian Aset, Legal Audit Aset, Inventarisasi Aset, pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset) serta Optimalisasi Aset yang membentuk pola pengelolaan saling berhubungan dengan baik. Birokrasi yang baik mendukung adanya pengelolaan yang baik pula oleh karena itu menurut Sidabalok (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan antara inventarisasi, legal audit, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi BMD. Hal ini berarti bahwa jika tiga hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada suatu organisasi/instansi pemerintah, maka aset yang ada dapat dikelola dengan seoptimal mungkin dan akan berdampak pada peningkatan kualitas kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini yaitu baik secara parsial maupun simultan, semua variabel independen (inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (optimalisasi BMD) di Dispora Provinsi Sumatera Selatan.